

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
WALIKOTA TERNATE TAHUN ANGGARAN 2011  
TANGGAL 30 MARET 2012**

---

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. DASAR HUKUM**

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 khususnya dalam pasal 27 ayat (2) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2007 menegaskan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Laporan keterangan dimaksud disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Lebih lanjut ditegaskan dalam pasal 23 peraturan pemerintah dimaksud bahwa LKPJ dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD, berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD menetapkan Keputusan DPRD, Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, merupakan informasi dari Pemerintah kepada DPRD terkait dengan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat selama 1 (satu) tahun, sesuai amanat yang tertuang dalam peraturan

WaliKota Ternate Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Ternate Tahun 2011-2015. Diharapkan melalui tertib dan mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban ini, dapat lebih meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya implementasi terhadap pencapaian target pelaksanaan program/kegiatan SKPD tahun 2011. Dalam konteks inilah sebagai bentuk implementasi dari kewajiban tersebut, pada kesempatan ini kami sampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban WaliKota Ternate Tahun Anggaran 2011, dengan format dan sistematika sebagai berikut :

**BAB I    Pendahuluan**

- A. Dasar Hukum
- B. Gambaran Umum Daerah

**BAB II   Kebijakan Pemerintahan Daerah**

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah
- C. Prioritas Daerah

**BAB III   Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah**

- A. Pengelolaan Pendapatan Daerah
- B. Pengelolaan Belanja Daerah

**BAB IV   Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

- A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan
- B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

**BAB V    Penyelenggaraan Tugas Pembantuan**

- A. Tugas Pembantuan Yang Diterima
- B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

**BAB VI   Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan**

- A. Kerjasama Antar Daerah
- B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
- C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah
- D. Pembinaan Batas Wilayah
- E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana
- F. Pengelolaan Kawasan Khusus
- G. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

**BAB VII   Penutup**

## B. GAMBARAN UMUM DAERAH

### 1. ISU STRATEGI DAERAH

Sebelum masuk pada pembahasan kebijakan pemerintah daerah, yaitu implementasi terhadap pelaksanaan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Ternate Tahun 2011. Pada bagian ini akan dijelaskan terlebih dahulu permasalahan atau isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian selama 5 (lima) tahun Implementasi RPJM Kota Ternate tahun 2011-2015, adalah sebagai berikut :

1. Masalah Sumber Daya Pemerintahan dan pelayanan publik.
  - Profesionalitas serta kompetensi aparatur birokrasi, relatif belum memadai sehingga belum mampu secara merata dan adil mendorong program dan kebijakan bagi kemandirian daerah, menjamin kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih, dan utilitas lainnya.
  - Mentalitas aparatur cenderung berorientasi proyek (*project oriented*) ketimbang berorientasi program. Kelemahan ini berimplikasi pada perencanaan program pembangunan antar wilayah dan antar sektor relatif belum integratif dan sinergi, selanjutnya berimplikasi pada belum terpenuhinya azas efisiensi, efektifitas, dan ekonomis dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran secara patut, dan memberikan kemanfaatan yang luas serta berkeadilan kepada masyarakat.
  - Belum efektifnya akses partisipasi publik yang berkualitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam menjamin akuntabilitas serta transparansi kebijakan anggaran (*clean governance*) sebagai implementasi prinsip-prinsip *good governance*.

- Belum optimalnya kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih dan utilitas lainya. Keluhan utamanya berkaitan dengan kepastian waktu, biaya dan tempat.
  - Belum terintegrasinya sistem pelayanan publik sehingga menimbulkan biaya tinggi akibat faktor ketidakpastian pelayanan.
  - Rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas serta kurangnya akses publik dalam perumusan kebijakan pembangunan kota.
  - Pergeseran paradigma pemerintah bukan lagi sebagai penguasa tetapi sebagai pelayan rakyat. Karena itu tugas Camat/Lurah mengikuti tugas Walikota sebagai pelayan rakyat. Berdaya tidaknya kecamatan/kelurahan sangat tergantung pada pelimpahan wewenang oleh walikota. Besaran kewenangan kecamatan sangat ditentukan oleh urusan yang dilimpahkan oleh Walikota.
2. Masalah Pemerataan pembangunan, Akses Perekonomian dan Kesejahteraan.
- Tidak seimbangya pertumbuhan antar wilayah, terutama wilayah Utara dan Selatan Ternate, termasuk wilayah Kecamatan di luar Pulau Ternate, seperti Moti, Hiri dan Batang Dua. Kesenjangan pembangunan antar wilayah ini berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi masyarakatnya.
  - Belum sinerginya kegiatan ekonomi perkotaan dengan kegiatan ekonomi pedesaan, sehingga wilayah luar cenderung mengalami dampak penurunan pertumbuhan (*backwash effects*).
  - Kurangnya akses masyarakat, terutama pelaku usaha jasa konstruksi terhadap proyek pemerintah akibat terjadinya

praktek mafia ekonomi dan monopoli kepada beberapa pengusaha. Sulitnya pengusaha kecil, petani, nelayan dan koperasi mendapat sumber permodalan dan pendampingan manajemen pengembangan usaha.

- Informasi potensi dan peluang Usaha belum optimal dipromosikan, padahal Kota Ternate sebagai kota perdagangan dan jasa utama di Maluku Utara memiliki peluang Investasi yang cukup tinggi.
- Akses usaha yang belum merata, dan rendahnya produktivitas ketenagakerjaan. Ketergantungan terhadap pasokan bahan kebutuhan pokok dari luar adalah situasi rentan terhadap kemandirian ekonomi rakyat.

### 3. Masalah Penataan Kawasan Perkotaan.

- Tidak terkendalinya pertumbuhan penduduk baik akibat pertambahan penduduk alamiah maupun akibat urbanisasi sehingga melahirkan kawasan pemukiman kumuh dan kemiskinan kota.
- Karena keterbatasan lahan kota dan inkonsistensi kebijakan penataan ruang membuat terjadi alih fungsi lahan secara besar-besaran baik di wilayah pesisir pantai maupun kawasan hutan lindung.
- Belum terintegrasinya keruangan (*spatial integration*) secara seimbang pada setiap simpul strategis wilayah perkotaan.
- Belum tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) bagi warga kota akibat kebijakan komersialisasi kawasan perkotaan serta desain tata ruang yang belum memihak kebutuhan publik.
- Kurangnya ruang untuk mewadahi kegiatan PKL yang menimbulkan marginalisasi sektor informal dari sistem ekonomi perkotaan secara integratif.

- Terabaikannya potensi kawasan pesisir pantai dengan tidak tersedianya prasarana dan sarana kelautan yang berakibat pada menurunnya aktivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir pantai.
  - Belum mandiri dan terarahnya pembangunan Kota Baru sehingga mengakibatkan, masyarakat pada kawasan sekitar membangun pemukimannya tanpa memperhatikan penataan wilayah dan kawasan yang sesuai dengan konsep penataan ruang.
  - Kesemerawutan Kota, akibat pertumbuhan kendaraan bermotor tanpa diimbangi oleh ketersediaan infrastruktur jalan dan regulasi yang sering tidak konsisten. Minimnya lahan parkir menjadi penyebab utama kemacetan di beberapa pusat perdagangan. Ruang publik bagi pejalan kaki tidak lagi berfungsi karena difungsikan bagi PKL.
4. Masalah Banjir, Sampah dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Menurunnya kualitas fisik lingkungan perkotaan, sebagai implikasi dari eksploitasi pembangunan, serta pengelolaan kawasan yang tidak diikuti dengan penataan ruang yang baik dan konsisten.
  - Penataan drainase dan pengelolaan persampahan yang belum memadai.
  - Dan Minimnya Kesadaran warga terhadap lingkungan hidup yang baik menimbulkan masalah banjir, sanitasi yang buruk dan terjadinya abrasi pada wilayah pantai.
  - Kebijakan pemerintah kota yang belum memperhatikan daya dukung lingkungan dalam pembangunan perkotaan.
5. Masalah Pendidikan, Kesehatan
- Kualitas output pendidikan yang masih rendah sehingga belum mampu menjawab kesempatan kerja yang tersedia.

- Rendahnya kualitas moral anak didik yang tercermin dalam perilaku bermasyarakat.
- Belum meratanya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan yang mudah, murah, berkualitas dan merata, terutama masyarakat yang berada di Kecamatan Moti, Pulau Hiri dan Pulau Batang Dua.
- Komersialisasi Kesehatan Ini ditandai Dengan Mahalnya Biaya Kesehatan Akibat Pelayanan Rumah Sakit yang belum profesional akibat Praktek Dokter Ahli lebih memilih berpraktek di Rumah sakit swasta atau klinik ketimbang melayani pasien di RSUD.
- Manajemen Pelayanan Rumah Sakit Yang Belum Mengakomodasi Masyarakat Miskin (Jamkesda) Dan Pemegang Askes.
- Masih rendahnya proporsi anggaran kesehatan dalam APBD.
- Kematian Ibu dan bayi, yang masih cukup tinggi adalah akibat dari buruknya akses pelayanan kesehatan yang tersedia.

#### 6. Masalah Sosial Budaya dan Keagamaan.

- Masih rendahnya kesadaran budaya hidup toleran masyarakat terutama dalam hal penutupan jalan untuk acara-acara tertentu.
- Rendahnya kualitas moral anak didik yang tercermin dalam perilaku bermasyarakat.
- Fenomena meningkatnya kekerasan terhadap perempuan baik dalam rumah tangga (KDRT), maraknya kasus perkosaan dan meningkatnya angka perceraian di Kota Ternate adalah fenomena yang harus menjadi perhatian kita semua. Fenomena PSK di Kota Ternate adalah penyakit sosial yang berhubungan erat dengan kehidupan ekonomi dan isu moralitas. Tingkat pendidikan yang ditempuh oleh kaum

wanita dan terpinggirkan peran wanita dalam pembangunan seperti, masih bias gender dalam penerimaan pegawai, promosi jabatan dan diskriminasi dalam dunia kerja. Fenomena ini tidak lagi menjadi isu domestik perempuan tetapi isu mendasar pembangunan Kota Ternate kedepan.

- Belum sinerginya integrasi sosial masyarakat dalam upaya peningkatan partisipasi yang lebih luas dan efektif dalam membuat kebijakan publik yang menyangkut masyarakat.
- Penanganan masalah sosial budaya yang terkait dengan masalah kemiskinan perkotaan, gesekan kepentingan antar masyarakat dan antar kampung.
- Makin menjauhnya sebagian besar masyarakat dari nilai adat budaya lokal, termasuk pemaknaan atas *adat se ator* sebagai sumber nilai dan etos sosial, yang terbukti ampuh menjadi nilai identitas masyarakat Ternate pada masa kejayaannya.
- Berkurangnya perhatian dan kesadaran pemerintah daerah, dan stakeholder di daerah, untuk melakukan rekonstruksi nilai budaya dan kearifan lokal.
- Belum maksimalnya peran lembaga keagamaan serta perhatian yang hanya fokus pada sarana prasarana tanpa penguatan basis nilai religiusitas semakin menjauhkan warga dari nilai-nilai agama.
- Masih tingginya angka buta baca Al-Quran di Kota Ternate.

#### 7. Masalah Keuangan dan Kemandirian Fiskal.

- Kurangnya kemandirian fiskal Kota Ternate tergambar dari rendahnya kontribusi Pendapatan Asli daerah (PAD) dalam pembiayaan APBD. Ketimpangan fiskal yang tinggi menunjukkan belum optimalnya kinerja sektor ekonomi



sehingga kontribusi pendapatan pajak dan retribusi belum signifikan dalam Pendapatan Daerah Kota Ternate.

- APBD dibuat seringkali lebih berpihak kepada penentu kebijakan daripada kepentingan rakyat. Kurangnya alokasi anggaran untuk belanja Modal (investasi), padahal belanja modal ini penting bagi stimulus ekonomi kota di masa yang akan datang, terutama infrastruktur seperti pembangkit tenaga listrik, air minum dan transportasi.

#### 8. Masalah Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di level makro ternyata tidak diikuti pada ekonomi riil di level mikro. Fenomena kemiskinan dan pengangguran adalah gambaran tidak terkoneksi antara gambaran makro ekonomi dan kehidupan ekonomi masyarakat secara umum. Inflasi yang masih cukup tinggi telah menurunkan pendapatan riil warga dan pada akhirnya menurunkan daya beli. Kurangnya akses sumberdaya ekonomi dan belum meratanya pembangunan semakin memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum.

## 2. TAHAPAN PEMBANGUNAN RPJM KOTA TERNATE TAHUN 2011, TARGET DAN CAPAIAN KINERJA EKONOMI KOTA TERNATE TAHUN 2011

Dalam upaya mewujudkan Ternate menjadi Kota “Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan” atau BAHARI BERKESAN sebagai tujuan akhir perodesasi, maka perlu disusun suatu pentahapan pembangunan Kota Ternate 2011-2015, yang telah ditetapkan dalam 5 (lima) tahapan pembangunan dengan penguatan pada 11 Program Prioritas disetiap tahapannya, untuk tahap pembangunan 2011 merupakan tahapan untuk menyambung, melanjutkan dan menajamkan capaian RPJMD Kota Ternate 2005-

2010, sebagai tahapan dasar pembangunan lima tahun ke depan (2011-2015).

Tahap pembangunan 2011 juga merupakan tahap untuk menjaga, meneruskan dan melanjutkan pembangunan yang sudah dicapai dan dilaksanakan 5 (lima) tahun sebelumnya dengan mengutamakan peningkatan dan penataan infrastruktur perkotaan, pendidikan dan kesehatan.

Pembangunan di tahun 2011 lebih menegaskan komitmen untuk penguatan pada 3 (tiga) program sebagai fokus utama pembangunan di Tahap I, antara lain :

1. **Peningkatan Dan Penataan Infrastruktur Perkotaan Serta Percepatan Dan Pemerataan Infrastruktur Pada Wilayah Kecamatan;** yang diarahkan pada peningkatan dan penataan infrastruktur perkotaan serta percepatan dan pemerataan infrastruktur secara merata dan berkeadilan di tiap kecamatan, terutama pada kecamatan-kecamatan di luar kawasan perkotaan untuk membuka keterisolasian, serta memungkinkan terjadinya mobilitas arus barang dan manusia yang mempercepat perkembangan secara merata pada semua wilayah kecamatan.
2. **Pendidikan Murah, Terjangkau dan Berkualitas;** yang diarahkan pada upaya peningkatan Sumber Daya Manusia, khususnya peningkatan derajat Pendidikan melalui perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau, sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup, dan mutu yang terus membaik.
3. **Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas;** yang diarahkan pada upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia, melalui peningkatan derajat Kesehatan dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau, dukungan sarana dan fasilitas memadai, ketersediaan dokter, tenaga kesehatan dan

keperawatan yang cukup, dan mutu pelayanan yang terus membaik.

Disamping melaksanakan penguatan pada 3 (tiga) program prioritas ditahun 2011, yang tertuang dalam RPJM Kota Ternate 2011-2015, Pemerintah Kota Ternate juga melaksanakan 8 program prioritas lainnya dan sejumlah kegiatan pendukung lainnya yang bersifat strategis dan populis, yang secara bersinergi telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi makro Kota Ternate tahun 2011, sebagaimana penjelasan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel  
Target dan Capaian Kinerja Ekonomi Makro Kota Ternate  
Tahun 2011

NO	INDIKATOR EKONOMI	TARGET	CAPAIAN
1.	Pertumbuhan Ekonomi	7,36 %	8,03 %
2.	Inflasi	3,00 %	4,52 %
3.	Pendapatan Perkapita	Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.955.276,-
4.	Penduduk Miskin	11,00 %	3,99 %
5.	IPM	74,62 %	76,93 %
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	10,42%	8,66 %

Capaian ini menjelaskan bahwa kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Ternate melalui APBD tahun anggaran 2011, telah mampu mendorong peningkatan pada beberapa indikator ekonomi makro 9 sektor PDRB Kota Ternate dan pertumbuhan ekonomi Kota Ternate. Kota Ternate sebagai pintu gerbang Propinsi Maluku Utara mempunyai nilai lebih dari sudut pandang ekonomi dibandingkan daerah lain. Selama tahun 2011 perekonomian Kota Ternate diprediksikan tumbuh sebesar 8,03 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2010 yaitu sebesar 7,9 persen. Kota Ternate yang telah dikenal sebagai Kota Perdagangan sejak dahulu kala menyebabkan perekonomian

Kota Ternate didominasi tiga sektor utama yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor perdagangan dan sektor jasa.

Seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Ternate maka nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 mencapai 1.143,514 milyar rupiah atau lebih tinggi dibanding tahun 2010 yaitu sebesar 989,655 milyar rupiah. Dengan adanya peningkatan tersebut mengindikasikan telah terjadi peningkatan produktivitas pada sektor-sektor ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Pendapatan perkapita Kota Ternate pada tahun 2010 sebesar Rp 2.777.467 meningkat menjadi Rp. 2.955.276 pada tahun 2011.

Keanekaragaman definisi inflasi dalam literatur ekonomi terjadi karena luasnya pengaruh inflasi dalam berbagai sektor perekonomian, namun pada prinsipnya terdapat kesatuan pandangan bahwa inflasi merupakan suatu fenomena dan dilema dalam ekonomi. Inflasi adalah suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga-harga secara tajam yang berlangsung terus menerus dalam jangka waktu cukup lama sehingga mengindikasikan semakin melemahnya daya beli masyarakat yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (*intrinsic*) mata uang suatu negara. Inflasi Kota Ternate pada tahun 2011 adalah 4,52 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan Inflasi nasional sebesar 0,57 persen. Semua kelompok komoditas mengalami inflasi terutama kelompok bahan makanan yang memberikan sumbangan terbesar dalam terjadinya inflasi di Kota Ternate.

Ditinjau secara ekonomi makro perkembangan ekonomi yang membaik pada salah satu bidang atau sektor tertentu harus memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian secara menyeluruh, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi yang

tinggi harus dibarengi dengan pemerataan dan perluasan kesempatan kerja, karena salah satu indikator penting lainnya dalam melihat pertumbuhan ekonomi adalah indikator ketenagakerjaan. Dalam hal ketenagakerjaan disamping keadaan angkatan kerja dan struktur ketenagakerjaan, permasalahan penting lainnya adalah pengangguran. Pengangguran dari sisi ekonomi dapat diartikan sebagai ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Walaupun relatif kecil Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Ternate tahun 2011 yang tercatat sebesar 8,66 persen (Hasil Sakernas Agustus 2011), angka ini mengalami penurunan atau lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2010 yang tercatat sebesar 10,31 persen.

Secara konseptual Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah) dan Indeks Standar Hidup Layak. IPM merupakan alat ukur kinerja pembanguann yang dilakukan di suatu wilayah Negara, propinsi maupun kabupaten/kota. IPM bisa digunakan sebagai salah satu petunjuk untuk melihat apakah arah pembangunan yang telah dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan. IPM dan komponen-komponen penyusun IPM dapat dimanfaatkan sebagai penilaian lintas sektoral terhadap hasil-hasil pembangunan daerah.

IPM sebagai indikator pencapaian pembangunan manusia di Kota Ternate menunjukkan nilai yang terus meningkat selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2009 nilai IPM Kota Ternate tercatat 76,13 dan peringkat pertama di Propinsi Maluku Utara. Pada tahun

2010 nilai IPM Kota Ternate meningkat menjadi 76,58 dan masih merupakan peringkat pertama di Propinsi Maluku Utara. Sedangkan untuk tahun 2011 IPM Kota Ternate diprediksikan meningkat sebesar 76,93%.

Kota Ternate sebagai sentra ekonomi memiliki peran strategis di wilayah Maluku Utara. Hal ini tentunya didukung dengan peningkatan berbagai infrastruktur yang lebih baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu mengurangi tingkat pengangguran dan pemerataan pendapatan. Berbagai gambaran indikator ekonomi makro tersebut diatas merupakan faktor utama sekaligus menjadi momentum perencanaan kebijakan kedepan, terutama untuk mendukung Tahun Pencanangan Investasi Tahun 2012.

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH**

#### **A. VISI DAN MISI**

##### **1. VISI**

Dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan Pemerintahan Kota Ternate, berpedoman pada Visi-Misi dan 11 Program Prioritas sebagaimana tertuang dalam RPJM Kota Ternate, dengan Visi yaitu:

**TERWUJUDNYA TERNATE MENJADI KOTA “BERBUDAYA, AGAMAI, HARMONIS, MANDIRI, BERKEADILAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”.**

##### **2. MISI**

Misi merupakan instrumen penting untuk menjabarkan Visi Kota Ternate 2011-2015, maka Misi Kota Ternate meliputi :

1. Mewujudkan Ternate Yang Agamis.
2. Mewujudkan Pemerataan Sarana Dan Prasarana Perekonomian Yang Lebih Representatif.
3. Membangun Ternate Sebagai Kota Pesisir Berbasis Lingkungan.
4. Membangun Ternate Sebagai Kota Pariwisata Berciri Budaya Dan Bahari.
5. Membangun Ternate Sebagai Kota Terbuka, Demokratis Dan Adil.
6. Membangun Ternate Yang Sehat Dan Sejahtera.

#### **B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Mengacu pada Visi dan Misi Kota Ternate dan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Ternate

2011-2015, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah meliputi :

**1. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Pertama**

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Pertama** :

Peningkatan Dan Penataan Infrastruktur Perkotaan Serta Percepatan Dan Pemerataan Infrastruktur Pada Wilayah Kecamatan, strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

Mempercepat pembangunan sarana infrastruktur wilayah di luar kawasan perkotaan berupa pemerataan pelayanan Air Bersih dan pelayanan Listrik pada kecamatan Hiri, Moti dan Batang Dua.

**2. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Dua**

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Dua** :

Mewujudkan Pendidikan Murah, Terjangkau dan Berkualitas, strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, pemerataan tenaga pengajar dan peningkatan mutu pendidikan pada semua tingkatan dengan alokasi dana penunjang melalui APBD, serta pemberian beasiswa dan insentif.

**3. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Tiga**

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Tiga** :

Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas, strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan masyarakat secara efektif dan tepat sasaran, yang menjangkau seluruh masyarakat miskin.



#### **4. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Empat**

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Empat** :

Kebijakan Anggaran (APBD) Yang Proporsional dan Pro Rakyat, strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

Menetapkan *One Village One Program* dengan penguatan pada kapasitas aparatur, serta membangun rumah Layak Huni Keluarga Kurang Mampu dengan dana stimulus Pemerintah Daerah yang melibatkan keswadayaan masyarakat melalui budaya Gotong Royong atau Bari.

#### **5. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Lima**

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Lima** :

Penataan, Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang Kota Yang Serasi Antara Kebutuhan dan Daya Dukung Lahan, Antar Aspek Topografi Dan Kawasan Pantai/Pesisir Berbasis Keterpaduan dan Keserasian Lingkungan Sosial Budaya Dan Ekologis, strategi pembangunan yang ditempuh adalah: Penataan kawasan tapak I plus, tapak II dan penataan taman kota serta ruang terbuka hijau perkotaan sebagai area publik yang asri, nyaman dan tertib dan mendorong partisipatif untuk mewujudkan Ternate sebagai Kota Pantai yang Hijau, Asri, Bersih, Nyaman, dan Ramah Lingkungan.

#### **6. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Enam**

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Enam** :

Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Dengan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Yang Profesional, Bersih Dan Berwibawa, Serta Birokrasi Yang Efisien, Efektif, Kreatif, Inovatif Dan Responsif, strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

Melakukan penataan organisasi perangkat daerah guna mewujudkan aparatur pemerintahan yang profesional, bersih (bebas KKN), kreatif, inovatif dan responsif dalam optimalisasi kinerja fungsi dan tugasnya.

#### **7. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Tujuh**

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Tujuh** :

Peningkatan Ekonomi Rakyat, Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja, strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

Meningkatkan pengembangan Koperasi dan UMKM serta Pedagang Tradisional dan PKL dengan memberikan kemudahan izin usaha pada masyarakat kurang mampu serta memberikan kepastian hukum dan kemudahan izin usaha bagi Investor.

#### **8. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Delapan**

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Delapan** :

Pelayanan Publik yang Cepat, Murah dan Mudah, strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

Membangun pelayanan satu titik (*one stop services*), untuk pelayanan publik, sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien.

#### **9. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Sembilan**

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Sembilan** :

Pengembangan Masyarakat Kawasan Pesisir Secara Berkelanjutan, strategi pembangunan yang ditempuh adalah:

Pemetaan potensi masyarakat pesisir, penyediaan sarana prasarana nelayan serta memberikan bantuan modal usaha dan pendampingan, serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan

Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan pedampingan pemberdayaan.

#### **10. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Sepuluh**

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Sepuluh** :

Membangun Kepedulian Sosial, Kesadaran Nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Adat Istiadat, strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

Meningkatkan pembinaan kerukunan Antar Umat Beragama, Antar Suku, Etnis dan Subetnis, melalui penguatan Kurikulum Pendidikan Agama dan kurikulum Muatan Lokal tentang Budaya dan Adat Istiadat Ternate.

#### **11. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Sebelas**

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Sebelas** :

Penegakan Supremasi Hukum, Hak Azasi Manusia, Untuk Mendorong Partisipasi Publik Yang Dinamis dan Konstruktif, strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

Memperkuat regulasi terhadap partisipasi publik yang dinamis, efektif dan bertanggungjawab dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dengan mengutamakan Standar Pelayanan Minimal pada bidang pelayanan dasar untuk publik.

### **C. PRIORITAS DAERAH**

Sebagai penjabaran dari strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dan dengan memperhatikan permasalahan khas perkotaan dan kondisi obyektif, maka program prioritas daerah mengacu pada 11 Program Prioritas Kota Ternate 2011-2015, sebagai berikut :

1. Peningkatan dan Penataan Infrastruktur Perkotaan Serta Percepatan dan Pemerataan Infrastruktur Pada Wilayah Kecamatan

2. Mewujudkan Pendidikan Murah, Terjangkau dan Berkualitas
3. Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas
4. Kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat
5. Penataan, Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang Kota Yang Serasi Antara Kebutuhan Dan Daya Dukung Lahan, Antar Aspek Topografi Dan Kawasan Pantai/Pesisir Berbasis Keterpaduan Dan Keserasian Lingkungan Sosial Budaya Dan Ekologis
6. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Dengan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Yang Profesional, Bersih Dan Berwibawa, Serta Birokrasi Yang Efisien, Efektif, Kreatif, Inovatif Dan Responsif
7. Peningkatan Ekonomi Rakyat, melalui pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja
8. Pelayanan Publik yang Cepat, Murah dan Mudah
9. Pengembangan Masyarakat Kawasan Pesisir Secara Berkelanjutan
10. Membangun Kepedulian Sosial, Kesadaran Nilai Keagamaan
11. Penegakan Supremasi Hukum, Hak Azasi Manusia, untuk mendorong Partisipasi Publik yang Dinamis dan Konstruktif.

Dari kebijakan 11 program prioritas tersebut diatas, terdapat juga beberapa kebijakan strategis yang menonjol dan menjadi penguatan sesuai pentahapan dalam RPJM antara lain :

1. Peningkatan aksesibilitas dan pelayanan pendidikan;
2. Peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat;
3. Penciptaan iklim usaha yang kondusif dan jaminan investasi;
4. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
5. Memfasilitasi permodalan dan daya saing usaha mikro kecil dan menengah (UMKM);
6. Pengentasan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan;
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
8. Pengembangan budaya daerah serta menggali potensi wisata.

## **BAB III**

### **KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

#### **A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

Sebagaimana kita ketahui untuk menjaga kelangsungan pembangunan di daerah, maka faktor yang sangat penting adalah dengan tersedianya sumber-sumber pendapatan daerah yang memadai, oleh karena itu segala upaya ditempuh oleh daerah dalam rangka meningkatkan sumber-sumber pendapatan di daerah, antara lain meliputi :

##### **1. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah**

Adapun kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah dalam tahun 2011 adalah kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, yang meliputi antara lain :

###### **a. Kegiatan Intensifikasi**

1. Pendataan : adalah mendata objek-objek pajak dan retribusi baru yang belum didata dengan tujuan untuk memperluas dan menambah potensi pajak dan retribusi daerah.
2. Pendaftaran : adalah mendaftarkan objek-objek pajak dan retribusi baru dengan tujuan untuk menerbitkan NPWPD, agar dapat mengetahui secara konkrit jumlah potensi pajak dan retribusi daerah.
3. Penetapan : adalah mengadakan perhitungan dan menetapkan besaran nilai pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Penagihan : adalah mengadakan penagihan kepada semua wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang sudah terdaftar.

b. Kegiatan Ekstensifikasi

1. Membuat peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.
2. Melakukan sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi.
3. Melakukan kegiatan pengkajian atau survey ke daerah yang lebih maju dengan karakteristik yang hampir sama dengan Kota Ternate untuk dapat mengetahui kemungkinan adanya sumber-sumber pendapatan daerah yang lain.
4. Mengikutsertakan aparat pengelola pendapatan dalam kegiatan seminar dan workshop, baik pada tingkat lokal maupun nasional dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang pendapatan.

## **2. Target Dan Realisasi Pendapatan**

Adapun target pendapatan daerah Kota Ternate tahun 2011 sebesar Rp. 537.609.031.800,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 527.902.472.846,- atau 98.19 % dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Adapun target Pendapatan Asli Daerah Kota Ternate pada tahun 2011 sebesar Rp. 32.200.000.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 32.449.751.002,- atau 100.78 %, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Adapun target pajak daerah pada tahun 2011 sebesar Rp. 14.500.000.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 15.889.426.180,- atau 109,58 %.

2. Retribusi Daerah

Adapun target retribusi daerah pada tahun 2011 sebesar Rp. 11.452.000.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 10.981.935.038,- atau 96,12 %.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Adapun target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 263.772.207,- atau 52.75 %.

4. Lain-lain PAD Yang Sah

Adapun target lain-lain PAD yang sah pada tahun 2011 sebesar Rp. 5.775.000.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 5.314.617.577,- atau 92.03 %.

- b. Dana Perimbangan

Adapun target Dana Perimbangan pada tahun 2011 sebesar Rp. 406.929.540.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 394.183.708.114,- atau 96.87 %, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bagi Hasil Pajak

Adapun target bagi hasil pajak pada tahun 2011 sebesar Rp. 52.009.000.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp. 42.799.147.368,- atau 82.29 %.

2. Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Adapun target bagi hasil sumber daya alam pada tahun 2011 sebesar Rp. 11.377.000.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp. 8.001.804.746,- atau 70.33 %.

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Adapun target dana alokasi umum pada tahun 2011 sebesar Rp. 314.020.640.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp. 313.861.356.000,- atau 99,95 %.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Adapun target dana alokasi khusus pada tahun 2011 sebesar Rp. 29.522.900.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 29.521.400.000,- atau 99,99 %.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah

Adapun target Lain-lain Pendapatan Daerah pada tahun 2011 sebesar Rp. 98.479.491.800,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 101.269.013.730,- atau 102.83 %, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bagi Hasil Pajak Propinsi

Adapun target bagi hasil pajak propinsi pada tahun 2011 sebesar Rp. 15.710.000.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp. 14.102.546.659,- atau 89.77 %.

2. Dana Penyesuaian

Adapun target dana penyesuaian pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 81.509.491.800,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp. 85.416.616.880,- atau 104.79 %.

3. Penerimaan Lainnya

Adapun target penerimaan lainnya pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.260.000.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp. 1.749.850.191,- atau 138.88 %.



Secara jelas Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Ternate tahun 2011 berdasarkan jenis penerimaan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah  
Kota Ternate Tahun 2011

No Rek	JENIS PENERIMAAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
	<b>A. PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>			
	<b>I. PAJAK DAERAH</b>			
	1.1 PAJAK HOTEL	850.000.000	1.094.955.419	128.82
	1.2 PAJAK RESTORAN	2.000.000.000	2.879.175.707	143.96
	1.3 PAJAK HIBURAN	100.000.000	78.112.450	78.11
	1.4 PAJAK REKLAME	800.000.000	779.677.600	97.46
	1.5 PAJAK PENERANGAN JALAN	5.000.000.000	7.332.307.359	146.65
	1.6 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	2.000.000.000	2.301.220.000	115.06
	1.7 PAJAK PARKIR	200.000.000	42.267.540	21.13
	1.8 PAJAK AIR TANAH	950.000.000	107.395.280	11.30
	1.9 PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	2.600.000.000	1.274.314.825	49.01
	<b>TOTAL PAJAK DAERAH</b>	<b>14.500.000.000</b>	<b>15.889.426.180</b>	<b>109,58</b>
	<b>II. RETRIBUSI DAERAH</b>			
	2.1 RET. PEL. PERSAMPAHN/KEBERSHN	1.500.000.000	1.614.370.500	107.62
	2.2 RET. PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTE CAPIL	690.000.000	415.470.000	60.21
	2.3 RET. PARKIR DITEPI JALAN UMUM	1.100.000.000	1.236.950.000	112.45
	2.4 RET. P A S A R	3.550.000.000	3.300.479.648	92.97
	2.5 RET. PENGUJIAN KEND. BERMOTOR	250.000.000	182.805.000	73.12
	2.6 RET. PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN	700.000.000	543.650.000	77,66
	2.7 RET. PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERH	250.000.000	161.960.000	64.78
	2.8 RET. T E R M I N A L	425.000.000	438.800.000	103.25
	2.9 RET. PENYEDOTAN KAKUS	80.000.000	21.550.000	26,94
	2.10 RET. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	935.000.000	1.031.978.455	110,37
	2.11 RET. IZIN GANGGUAN	810.000.000	941.825.375	116,27
	2.12 RET. IZIN TRAYEK	100.000.000	24.975.000	24,98
	2.13 RET. IZIN REKREASI DAN OLAHRAGA	205.000.000	205.731.000	100,36
	2.14 RET. RUMAH POTONG HEWAN	100.000.000	52.975.000	52.98
	2.19 RET. TEMPAT KHUSUS PARKIR	305.000.000	352.350.000	115.52
	2.20 RET. IZIN PERIKANAN	250.000.000	279.786.060	111.91
	2.21 RET.PELAYANAN KEPELABUHANAN	85.000.000	176.279.000	207.39
	2.22 RET. PELAYANAN TERA/TERA ULANG	30.000.000	-	-
	2.23 RET. PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA	30.000.000	-	-
	2.24 RET.TEMPAT PELELANGAN	30.000.000	-	-
	<b>TOTAL RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>11.425.000.000</b>	<b>10.981.935.038</b>	<b>96.12</b>
	<b>III. KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN</b>			
	3.1 BAGIAN LABA PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	500.000.000	263.772.207	52.75
	<b>TOTAL KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>	<b>500.000.000</b>	<b>263.772.207</b>	<b>52.75</b>

No Rek	JENIS PENERIMAAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
	<b>IV. LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>			
	4.1 SUMBANGAN PIHAK KETIGA	3.000.000.000	3.122.882.004	104.10
	4.3 JASA GIRO	400.000.000	287.807.530	69.70
	4.4 BUNGA DEPOSITO	400.000.000	315.534.246	78.88
	4.5 PENERIMAAN LAINNYA	1.975.000.000	1.597.393.797	80.88
	<b>TOTAL LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>	<b>5.775.000.000</b>	<b>5.314.617.577.</b>	<b>92.03</b>
	<b>TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>32.200.000.000</b>	<b>32.449.751.002</b>	<b>100.78</b>
	<b>B. DANA PERIMBANGAN</b>			
	<b>I. BAGI HASIL PAJAK</b>			
	1.1 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( PBB )	40.009.000.000	33.744.486.107	84.34
	1.2 PAJAK PENGHASILAN	12.000.000.000	9.054.661.261	75.46
	<b>TOTAL BAGI HASIL PAJAK</b>	<b>52.009.000.000</b>	<b>42.799.147.368</b>	<b>82.29</b>
	<b>II. BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM</b>			
	2.1 P S D H	2.609.000.000	319.031.272	12.23
	2.2 R O Y A L T Y	8.605.000.000	7.421.725.232	86.25
	2.3 P E R I K A N A N	163.000.000	261.048.242	160.15
	<b>TOTAL BAGI HASIL SDA</b>	<b>11.377.000.000</b>	<b>8.001.804.746</b>	<b>70.33</b>
	<b>III. DANA ALOKASI UMUM ( DAU )</b>			
	DANA ALOKASI UMUM	314.020.640.000	313.861.356.000	99.95
	<b>TOTAL DANA ALOKASI UMUM</b>	<b>314.020.640.000</b>	<b>313.861.356.000</b>	<b>99.95</b>
	<b>IV. DANA ALOKASI KHUSUS ( DAK )</b>			
	<b>DAK NON REBOISASI</b>			
	4.1 PENDIDIKAN	11.446.200.000	11.446.300.000	99.99
	4.2 KESEHATAN	3.659.300.000	3.659.100.000	99.99
	4.3 INFRASTRUKTUR/JALAN	5.845.800.000	5.845.600.000	100,00
	4.4 INFRASTRUKTUR AIR MINUM	965.300.000	965.200.000	99.99
	4.5 KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.188.000.000	3.187.900.000	100,00
	4.6 PERTANIAN /KEHUTANAN	1.010.000.000	1.010.000.000	100,00
	4.7 LINGKUNGAN HIDUP	1.161.100.000	1.061.100.000	100,00
	4.8 KELUARGA BERENCANA	908.000.000	908.000.000	100,00
	4.9 SANITASI	1.016.100.000	1.016.100.000	100,00
	4.10 TRANSPORTASI DARAT	323.100.000	323.100.000	100,00
	<b>TOTAL DANA ALOKASI KHUSUS</b>	<b>29.522.900.000</b>	<b>29.521.400.000</b>	<b>99.99</b>
	<b>TOTAL DANA PERIMBANGAN</b>	<b>406.929.540.000</b>	<b>394.183.708.114</b>	<b>96.87</b>
	<b>C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH</b>			
	<b>I. BAGI HASIL PAJAK PROPINSI</b>			
	1.1 PAJAK BHN BAKAR KEND. BERMTR	11.900.000.000	10.456.183.699	87,87
	1.2 BEA BALIK NAMA KEND. BERMOTOR	1.985.000.000	1.668.968.036	84.08
	1.3 PAJAK KEND. BERMOTOR	1.725.000.000	1.946.643.484	112.85
	1.4 PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH	100.000.000	30.751.440	30.75
	<b>TOTAL BAGI HASIL PAJAK PROPINSI</b>	<b>15.710.000.000</b>	<b>14.102.546.659</b>	<b>89.77</b>
	<b>II. DANA PENYESUAIAN</b>			
	2.1 TUNJANGAN KEPENDIDIKAN	20.379.787.800	24.181.862.880	118.66
	2.2 DANA AD-HOCK (DPPIP DAN DPIPD)	48.324.154.000	48.324.154.000	100,00
	2.3 DANA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)	12.805.550.000	12.910.600.000	100.82
	<b>TOTAL DANA PENYESUAIAN</b>	<b>81.509.491.800</b>	<b>85.416.616.800</b>	<b>104.79</b>
	<b>III. PENERIMAAN LAINNYA</b>			
	3.1 PENERIMAAN DANA TASPEN	260.000.000	117.298.300	45.11
	3.2 BANTUAN BANK DUNIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR	1.000.000.000	1.632.551.891	163.26
	<b>TOTAL PENERIMAAN LAINNYA</b>	<b>1.260.000.000</b>	<b>1.749.850.191</b>	<b>138.88</b>
	<b>TOTAL LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>98.479.491.800</b>	<b>101.269.013.730</b>	<b>102.83</b>
	<b>TOTAL PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>537.609.031.800</b>	<b>527.902.472.846</b>	<b>98,19</b>

## **B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH**

### **1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah**

Dengan mengacu pada kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran APBD, maka kebijakan umum keuangan daerah diarahkan pada komponen belanja langsung yang lebih besar dari belanja tidak langsung, dengan sasaran utama pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat di Bidang Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur serta peningkatan Sektor Potensial Bidang Perikanan, jasa dan perdagangan, usaha kecil dan menengah dalam rangka penguatan potensi ekonomi lokal dan peningkatan pendapatan masyarakat.

### **2. Target Dan Realisasi Belanja**

Adapun anggaran belanja dalam APBD Kota Ternate tahun 2011 sebesar Rp. 564.136.838.942,- realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 553.197.895.694,- atau 98 % dari total anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

#### **a. Belanja Pegawai**

Adapun belanja pegawai dalam APBD tahun 2011 sebesar Rp. 328.896.826.025,- realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 324.621.372.056,- atau 98,7 % dari total anggaran.

#### **b. Belanja Barang dan Jasa**

Adapun belanja barang dan Jasa dalam APBD tahun 2011 sebesar Rp. 101.319.424.368,- realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 95.784.420.145,- atau 94,54 % dari total anggaran.

c. Belanja Hibah

Adapun belanja hibah dalam APBD tahun 2011 sebesar Rp. 4.921.325.000,- realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 5.051.843.750,- atau 102,65 % dari total anggaran.

d. Bantuan Bantuan Sosial

Adapun belanja bantuan sosial dalam APBD tahun 2011 sebesar Rp. 9.411.308.170,- realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 9.411.308.170,- atau 100 % dari total anggaran.

e. Belanja Modal

Adapun belanja modal dalam APBD tahun 2011 sebesar Rp. 117.350.763.531,- realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 113.828.951.573,- atau 97 % dari total anggaran.

f. Belanja Tidak Terduga

Adapun belanja tidak terduga dalam APBD tahun 2011 sebesar Rp. 3.750.000.000,- realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 4.500.000.000,- atau 120 % dari total anggaran.

g. Belanja Bunga

Adapun belanja bunga dalam APBD tahun 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- tidak terealisasi hingga akhir tahun.

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

#### **A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN**

##### **1. Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan wajib tahun 2011, terdiri dari 280 program dan 1.487 kegiatan, dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Urusan Wajib Bidang Pendidikan, terdiri dari 17 program dan 152 kegiatan.
- 2) Urusan Wajib Bidang Kesehatan, terdiri dari 16 program dan 95 kegiatan.
- 3) Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum, terdiri dari 21 program dan 103 kegiatan.
- 4) Urusan Wajib Bidang Perumahan, terdiri dari 5 program dan 20 kegiatan.
- 5) Urusan Wajib Bidang Penataan Ruang, terdiri dari 10 program dan 62 kegiatan.
- 6) Urusan Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan, terdiri dari 11 program dan 61 kegiatan.
- 7) Urusan Wajib Bidang Perhubungan, terdiri dari 10 program dan 50 kegiatan.
- 8) Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup, terdiri dari 11 program dan 55 kegiatan.
- 9) Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari 7 program dan 39 kegiatan.
- 10) Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari 7 program dan 30 kegiatan.

- 11) Urusan Wajib Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari 6 program dan 40 kegiatan.
- 12) Urusan Wajib Bidang Sosial, terdiri dari 6 program dan 25 kegiatan.
- 13) Urusan Wajib Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari 5 program dan 5 kegiatan.
- 14) Urusan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari 7 program dan 37 kegiatan.
- 15) Urusan Wajib Bidang Kebudayaan, terdiri dari 8 program dan 46 kegiatan.
- 16) Urusan Wajib Bidang Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari 10 program dan 38 kegiatan.
- 17) Urusan Wajib Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, terdiri dari 17 program dan 73 kegiatan.
- 18) Urusan Wajib Bidang Pemerintahan Umum, terdiri dari 76 program dan 453 kegiatan.
- 19) Urusan Wajib Bidang Kepegawaian, terdiri dari 8 program dan 52 kegiatan.
- 20) Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari 10 program dan 33 kegiatan.
- 21) Urusan Wajib Bidang Kearsipan, terdiri dari 8 program dan 31 kegiatan.
- 22) Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari 5 program dan 22 kegiatan.

## **2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Alokasi dan Realisasi anggaran untuk urusan wajib sampai akhir tahun 2011, sesuai Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan fungsi pelayanan SKPD sebesar Rp. 508.188.456.067,- realisasi

sampai akhir tahun 89,06 %, yang meliputi urusan wajib sebagai berikut :

- 1) Urusan Wajib Bidang Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 192.179.233.202,- realisasi sampai akhir tahun 102,42 %.
- 2) Urusan Wajib Bidang Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.699.166.524,- realisasi sampai akhir tahun 95,65 %.
- 3) Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 79.016.040.166,- realisasi sampai akhir tahun 97,15 %.
- 4) Urusan Wajib Bidang Perumahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.937.088.335,- realisasi sampai akhir tahun 92.13 %.
- 5) Urusan Wajib Bidang Penataan Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.296.911.419,- realisasi sampai akhir tahun 93,81 %.
- 6) Urusan Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.406.864.003,- realisasi sampai akhir tahun 97,61 %.
- 7) Urusan Wajib Bidang Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.513.130.094,- realisasi sampai akhir tahun 95,87 %.
- 8) Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.326.486.395,- realisasi sampai akhir tahun 98,96 %.
- 9) Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.408.376.089,- realisasi sampai akhir tahun 96,79 %.

- 10) Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.270.789.312,- realisasi sampai akhir tahun 93,90 %.
- 11) Urusan Wajib Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.731.327.141,- realisasi sampai akhir tahun 99,78 %.
- 12) Urusan Wajib Bidang Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.684.110.594,- realisasi sampai akhir tahun 92,44 %.
- 13) Urusan Wajib Bidang Tenaga Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 323.765.750,- realisasi sampai akhir tahun 121,53 %.
- 14) Urusan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.991.080.906,- realisasi sampai akhir tahun 97,47 %.
- 15) Urusan Wajib Bidang Kebudayaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.408.388.707,- realisasi sampai akhir tahun 95,75 %.
- 16) Urusan Wajib Bidang Pemuda dan Olah Raga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.709.092.187,- realisasi sampai akhir tahun 98,35 %.
- 17) Urusan Wajib Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.590.330.899,- realisasi sampai akhir tahun 94,80 %.
- 18) Urusan Wajib Bidang Pemerintahan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 142.305.614.976,- realisasi sampai akhir tahun 80,87 %.
- 19) Urusan Wajib Bidang Kepegawaian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.839.654.154,- realisasi sampai akhir tahun 96,26 %.



- 20) Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.130.256.861,- realisasi sampai akhir tahun 98,03 %.
- 21) Urusan Wajib Bidang Kearsipan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.136.248.159,- realisasi sampai akhir tahun 97,91 %.
- 22) Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.592.441.642,- realisasi sampai akhir tahun 98,36 %.

## **B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN**

### **1. Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan pilihan tahun 2011 terdiri dari 51 program dan 198 kegiatan, dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Urusan Pilihan Bidang Pertanian, terdiri dari 18 program dan 74 kegiatan.
- 2) Urusan Pilihan Bidang Kehutanan, terdiri dari 4 program dan 10 kegiatan.
- 3) Urusan Pilihan Bidang Pariwisata, terdiri dari 2 program dan 13 kegiatan.
- 4) Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan, terdiri dari 11 program dan 47 kegiatan.
- 5) Urusan Pilihan Bidang Perdagangan, terdiri dari 10 program dan 33 kegiatan.
- 6) Urusan Pilihan Bidang Perindustrian, terdiri dari 6 program dan 21 kegiatan.

## **2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Alokasi dan Realisasi anggaran untuk urusan pilihan sampai akhir tahun 2011, sesuai Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan fungsi pelayanan SKPD sebesar Rp. 26.887.850.859,- realisasi sampai akhir tahun 96,87% yang meliputi urusan pilihan sebagai berikut :

- 1) Urusan Pilihan Bidang Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.365.613.015,- realisasi sampai akhir tahun 91,59%.
- 2) Urusan Pilihan Bidang Kehutanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.190.000.000,- realisasi sampai akhir tahun 141,84 %.
- 3) Urusan Pilihan Bidang Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.917.927.401,- realisasi sampai akhir tahun 82.27 %.
- 4) Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.568.237.391,- realisasi sampai akhir tahun 99,04 %.
- 5) Urusan Pilihan Bidang Perdagangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.213.425.300,- realisasi sampai akhir tahun 99.40%.
- 6) Urusan Pilihan Bidang Perindustrian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.355.877.734,- realisasi sampai akhir tahun 97,71 %.

## **BAB V**

### **PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

#### **A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA**

##### **1. Dasar Hukum**

Sebagaimana kita ketahui Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menganut 3 (tiga) azas penyelenggaraan pemerintahan, yaitu azas desentralisasi, azas dekonsentrasi dan azas tugas pembantuan. Khususnya terkait dengan pelaksanaan tugas pembantuan, mengacu pada pasal 1 butir (9) Undang-undang No. 32 Tahun 2004, yang menegaskan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dengan demikian tugas pembantuan pada hakekatnya merupakan tugas untuk membantu menjalankan urusan pemerintahan dalam tahap implementasi kebijakan yang bersifat operasional. Dengan tujuan untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat.

##### **2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Instansi pemberi tugas pembantuan kepada Pemerintah Kota Ternate dalam tahun 2011 yang berasal dari Pemerintah, dapat dirincikan sebagai berikut :

- a. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
- b. Departemen Perdagangan Republik Indonesia
- c. Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

- d. Departemen Kesehatan Republik Indonesia
- e. Departemen Pertanian Republik Indonesia
- f. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

### **3. Satuan Tugas Perangkat Daerah Yang Melaksanakan**

- a. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate
- c. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate
- d. Dinas Kesehatan Kota Ternate
- e. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ternate
- f. Badan Penanggulangan Dan Bencana Daerah Kota Ternate

### **4. Program Dan Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya**

- a. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate  
Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja dengan kegiatan berupa Konsolidasi Program-program Perluasan Kesempatan kerja, dan kegiatan Fasilitas Pendukung Pasar Kerja, Melalui Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Informasi, Penyelenggaraan Bursa Kerja serta kegiatan Penyelenggaraan Padat Karya Infrastruktur, yang diarahkan pada peningkatan pengawasan, konsolidasi dan fasilitas pendukung pasar kerja, perluasan kesempatan kerja dan diperuntukkan bagi lembaga kerja dan tenaga pencari kerja di Kota Ternate serta tersedianya sarana dan prasarana padat karya.
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate  
Program Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dengan kegiatan berupa Pembangunan dan pengamanan perdagangan dalam negeri, yang diarahkan pada pembangunan pasar higienis.

c. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate

Program Pengembangan dan Pengelolaan pengelolaan Perikanan Tangkap dan Peningkatan Daya Saing Produksi Perikanan dengan kegiatan berupa Pembinaan dan pengembangan kapal perikanan alat tangkap ikan dan pengawakan kapal perikanan, kegiatan fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan, kegiatan fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, serta kegiatan Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Ditjen P2HP yang diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan pelaku usaha penangkapan dan budidaya perikanan serta masyarakat pesisir di Kota Ternate.

d. Dinas Kesehatan Kota Ternate

Program Upaya Pembinaan Kesehatan dengan kegiatan berupa Pengadaan sarana dan prasarana Kesehatan, Bantuan Operasional kesehatan (BOK) untuk puskesmas di Kota Ternate dan Jaminan Persalinan yang langsung dibayar ke bidan-bidan yang melakukan pelayanan persalinan gratis kepada masyarakat.

e. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ternate

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan kegiatan berupa perluasan areal dan Pengolahan lahan pertanian, Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen prasarana dan sarana pertanian, serta pelayanan pembiayaan pertanian dan pengembangan usaha agrobisnis pedesaan.

f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program Penguatan Penyelenggaran Pemerintahan Umum dengan kegiatan berupa Fasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana dan penanggulangan yang diarahkan

pada pembangunan gedung kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate.

## **5. Sumber Dan Jumlah Anggaran**

### **a. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate**

Sumber dana untuk 3 (tiga) kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial berasal dari APBN, dengan Jumlah anggaran sebesar Rp. 424.100.000,-, realisasi hingga akhir tahun 100 %.

### **b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate**

Sumber dana untuk 1 (satu) kegiatan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan berasal dari APBN, dengan Jumlah anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,-, realisasi hingga akhir tahun 100 %.

### **c. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate**

Sumber dana untuk 4 (empat) kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan berasal dari APBN, dengan Jumlah anggaran sebesar Rp. 5.963.255.000,-, realisasi hingga akhir tahun 100 %.

### **d. Dinas Kesehatan Kota Ternate**

Sumber dana untuk 3 (tiga) kegiatan di Dinas Kesehatan berasal dari APBN dengan jumlah anggaran sebesar Rp.9.432.884.000,- dan realisasi hingga akhir tahun 100%.

### **e. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ternate**

Sumber dana untuk 3 (tiga) kegiatan di Dinas Pertanian dan Kehutanan berasal dari APBN dengan anggaran sebesar Rp. 620.000.000,- realisasi hingga akhir tahun 100%.

### **f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Sumber dana untuk 1 (satu) kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berasal dari APBN dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- realisasi hingga akhir tahun 100%.

## **B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN**

Untuk tugas pembantuan yang diberikan sesuai mekanisme tugas pembantuan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, yaitu penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota, serta dari Kabupaten/Kota ke Desa dan tidak ada tugas pembantuan dari Kabupaten/Kota ke Kecamatan. Namun demikian, seiring dengan adanya pemekaran Kecamatan dan Kelurahan serta dalam rangka merangsang partisipasi masyarakat untuk percepatan pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan, secara internal Pemerintah Kota Ternate menempuh kebijakan melalui bantuan dana Partisipatif dan dan bantuan Stimulan lainnya bagi Kecamatan dan Kelurahan yang secara tidak langsung merupakan bagian pelaksanaan tugas pembantuan.

## **BAB VI**

### **PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

#### **A. KERJASAMA ANTAR DAERAH**

##### **1. Kebijakan Dan Kegiatan**

Dalam rangka memberdayakan potensi daerah di tengah-tengah kemajuan dan kemampuan masing-masing daerah yang tidak sama, maka perlu ada kerjasama antar daerah di berbagai bidang. Adapun kerjasama antar daerah yang dijalin Pemerintah Kota Ternate dalam tahun 2011, antara lain :

Kerjasama Asosiasi Pemerintah Seluruh Indonesia (APEKSI) baik Nasional maupun APEKSI KOMWIL VI Kawasan Timur Indonesia, dengan realisasi Kegiatan berupa:

1. Musyawarah Raker KOMWIL VI pada tanggal 13 Mei 2011 di Ambon.
2. Rapat kerja Nasional Apeksi tanggal 27-31 Mei 2011 di Banda Aceh.
3. Workshop tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan tanggal 6 juli 2011 di Palu.

#### **B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA**

##### **1. Kebijakan Dan Kegiatan**

Sejalan dengan pelaksanaan kebijakan di berbagai bidang, maka Pemerintah Daerah menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak ketiga, meliputi :

1. Kerjasama Pemkot Dengan BPKP Perwakilan Maluku Utara, realisasi kegiatan berupa Mou tentang sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah.
- 2 Kerjasama dengan Pertamina, dengan realisasi bentuk kerjasama berupa pemberian bantuan 1 (satu) unit mobil



ambulance dan alat kesehatan (sarana kesehatan, sarana ibadah dan sarana umum).

- 3 Kerjasama Pemkot dengan Kementerian Koperasi dan UKM, realisasi kegiatan berupa Bantuan Penguatan Modal Koperasi dan UKM.
- 4 Kerjasama Pemkot Dengan BNI, dengan realisasi kegiatan Kerjasama berupa program kampung nelayan BNI yang di pusatkan di Kelurahan Dufa-Dufa.
- 5 Kerjasama Pemerintah Kota dengan Universitas Khairun, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dan Poltekes dalam rangka peningkatan SDM melalui program magister dan Diploma-III kesehatan, yang direalisasikan dengan mengikutsertakan pegawai Pemerintah Kota Ternate dalam menempuh pendidikan program magister di Universitas Khairun dan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara serta program Diploma III pada Politeknik Kesehatan Ternate.
- 6 Kerjasama Pemkot dengan Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Andalas dan Universitas Samratulangi, dengan realisasi kegiatan berupa membiayai putra-putri terbaik daerah untuk kuliah kedokteran secara gratis di Universitas Indonesia, Universitas Andalas dan Universitas Samratulangi.

## **C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH**

### **Kebijakan Dan Kegiatan**

Dalam pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di daerah, Pemerintah Kota Ternate telah menjalin kerjasama yang harmonis dengan berbagai instansi vertikal, antara lain melalui rapat-rapat koordinasi secara kontinu, terutama dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang sosial

keagamaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Realisasi pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, antara lain :

- a. Pembentukan posko penanggulangan bencana alam
- b. Sosialisasi bahaya bencana alam
- c. Patroli bersama keamanan dan ketertiban masyarakat
- d. Terselenggaranya pelayanan di bidang keagamaan (Ibadah Haji, STQ dan MTQ)

#### **D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH**

Kebijakan pembinaan batas wilayah di lingkungan Pemerintah Kota Ternate Tahun 2011, selain dilakukan melalui sosialisasi peraturan daerah tentang pembentukan Kelurahan dan Kecamatan disertai tugas, fungsi dan kewenangannya serta inventarisasi permasalahan sesuai karakteristik wilayah yang bersangkutan, disamping itu pembinaan juga dilakukan terkait dengan pengembangan potensi dan kawasan strategis pada masing-masing wilayah dimaksud, sehingga dapat dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna.

#### **E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA**

##### **1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya**

Sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana, maka secara intens Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Ternate telah memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan kegiatan Pemantauan Terpadu Bersama BMKG dan PVMG (Pos Pengamatan Gunung Api Gamalama), dalam rangka mengumpulkan data dan informasi akurat untuk disebarluaskan kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk antisipasi atau

peringatan dini penanganan dan penanggulangan bencana maupun terhadap situasi kedaruratan lainnya, baik pada saat sebelum terjadi, sedang terjadi maupun sesudah terjadi bencana.

Dengan telah terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Aset Peralatan Pencatat Gempa Bumi dan Tsunami / Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*), yang diadakan dan dikelola pada Badan Kesbangpol dan Linmas telah diserahkan pada tanggal 05 Januari 2011 dari Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Ternate kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate.

Sehubungan dengan itu maka terhitung mulai Tahun 2011 kegiatan koordinasi terpadu dan pelaporan maupun hal lain yang terkait dengan kebencanaan di Kota Ternate, telah ditangani sepenuhnya oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate sebagai lembaga teknis di bidang pencegahan, penanganan dan penanggulangan bencana di daerah.

Diawal tahun 2011, Kota Ternate telah diguyur hujan yang begitu lebat, yang disertai angin kencang sehingga menyebabkan sebagian besar wilayah Kota Ternate terkena angin puting beliung, serta terjadinya longsor yang tersebar di wilayah Kota Ternate, hal ini dilakukan investigasi dan penanganan, sehingga sebagian besar penanganan akibat terjadinya bencana dapat ditangani dengan baik. Di akhir Tahun 2011 kita dikejutkan dengan erupsinya gunung api Gamalama, sehingga mengakibatkan terjadinya banjir lahar dingin, dan akibatnya sebagian warga masyarakat melakukan pengungsian ditempat-tempat pengungsian yang tersebar di 9 (sembilan) titik pengungsian, dengan jumlah pengungsi 2.711 jiwa/627 KK. Disamping itu juga penanganan normalisasi aliran sungai/kalimati, yang dimaksudkan untuk menormalkan kembali

sungai/barangka yang tertimbun akibat erupsi gunung api Gamalama.

Upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Masyarakat dan daerahnya dari ancaman bencana telah dibangun infrastruktur berupa talud khususnya pada kawasan pemukiman warga serta pemberian dana Stimulan, namun hal ini dirasakan masih belum mampu mencegah tingginya kejadian bencana yang datang tidak terduga. disamping upaya Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan tempat tinggalnya perlu ditingkatkan kesadaran Masyarakat tentang lingkungan dan langkah pencegahan dalam mengurangi resiko bencana.

## **2. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana**

Terhadap keberadaan status Gunung Api Gamalama, maka dalam rangka kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini, telah dilakukan langkah-langkah sosialisasi sebagai berikut :

- a. Menghimbau kepada masyarakat di sekitar Gunung Gamalama diharapkan tenang dan tidak terpancing dengan isu-isu tentang letusan, namun tetap meningkatkan kewaspadaan dan senantiasa mengikuti arahan Pemerintah pada masing-masing Kelurahan agar dapat dikoordinasikan secara berjenjang ke Kecamatan sampai ke tingkat Kota.
- b. Memperingatkan kepada masyarakat di sekitar Gunung Gamalama dan pengunjung / wisatawan, tidak diperbolehkan mendaki dan mendekati *kawah* yang ada di puncak dalam radius 2 Km.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Geologi melalui Kepala Pos Pengamatan Gunung

Gamalama di Kel. Marikurubu Kec. Kota Ternate Tengah-Ternate.

### **3. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi**

Sesuai hasil analisa Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kota Ternate bahwa kejadian atau fenomena alam luar biasa akibat Hujan Deras dan Angin Kencang sewaktu-waktu secara periodik/musiman dapat saja terjadi di wilayah Kota Ternate. Selain itu Kota Ternate termasuk salah satu daerah atau kawasan yang sangat rawan terhadap kejadian bencana, karena Pulau Ternate sendiri selain dikelilingi oleh lautan juga memiliki Gunung Api Gamalama yang masih aktif dan intensitas vulkanologis yang relatif meningkat. Karenanya potensi bencana yang menjadi ancaman adalah :

- a. Bencana akibat kejadian *gempa bumi*, baik yang tidak berpotensi maupun yang berpotensi tsunami.
- b. Letusan Gunung Api Gamalama.

## **F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS**

Sejalan dengan pertumbuhan Kota Ternate yang terus meningkat, maka berkembang pula beberapa kawasan yang memiliki nilai strategis dan ekonomis karena merupakan sentra-sentra jasa dan perekonomian, oleh karena itu agar kawasan-kawasan strategis tersebut dapat tumbuh secara berkelanjutan dan tetap terjaga nilai ekonomisnya, maka kedepan perlu dikelola secara khusus dan bila perlu dapat diproteksi dengan peraturan daerah. Pada tahun 2011 terdapat kegiatan lanjutan Penyusunan Revisi terhadap dokumen RTRW dengan melakukan pemetaan pada beberapa kawasan khusus dan strategis, yaitu dalam rangka pengembangan investasi untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Ternate yang lebih baik .

## **G. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Secara umum pada Tahun 2011 situasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Ternate relatif kondusif, meskipun masih mudahnya masyarakat terprovokasi oleh isu-isu yang di gulirkan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab sehingga sering menimbulkan ketegangan bagi masyarakat. Beberapa masalah terkait dengan gangguan keamanan selama ini dapat diatasi, namun demikian stabilitas dan kondisi keamanan daerah perlu tetap mendapat perhatian, untuk menjamin keamanan masyarakat luas dalam melaksanakan aktifitas sosial dan ekonomi.

Terkait dengan situasi IPOLEKSOSBUD tercatat banyak aksi unjuk rasa dan protes yang terjadi, diantaranya :

- Penegakkan Hukum dan HAM = 48 kali,
- Pendidikan = 18 kali,
- Ekonomi dan Sosial Budaya = 40 kali,
- Politik = 13 kali,

Sehingga secara keseluruhan pada Tahun 2011 terdapat ( $\pm$  127 kejadian), aksi unjuk rasa baik yang dilakukan oleh kelompok pemuda dan mahasiswa maupun elemen masyarakat serta stakeholder lainnya dalam bentuk penyampaian aspirasi terhadap kebijakan publik seperti kebijakan ekonomi terkait penataan pasar dan penerbitan PKL, penjualan dan pengecer BBM maupun masalah-masalah pendidikan, ekonomi, politik dan demokratisasi hukum dan hak-hak azasi manusia termasuk KKN.

### **1. Gangguan Yang Terjadi**

- a) Gangguan Keamanan Dan Kenyamanan Akibat Pertikaian Antar Warga (Mangga Dua dengan Ubo-Ubo/Tabona).

- b) Gangguan Keamanan dan Ketertiban umum antara Masyarakat Dufa-Dufa dengan Tafure.
- c) Adanya gangguan separatis yang sengaja dilakukan oleh salah satu oknum masyarakat di kelurahan Marikurubu (Lingkungan BTN) yakni gerakan penyebaran ideologi Republik Maluku Selatan (RMS) dengan menggunakan simbol bendera RMS.

## **2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**

Adapun institusi yang memiliki tugas dan fungsi menangani ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan Pemerintah Kota Ternate adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat serta Satuan Polisi Pamong Praja dengan bekerjasama unsur POLRES Ternate, KODIM 1501 Ternate dan instansi lainnya, baik dengan melakukan penertiban maupun berbagai razia terhadap kegiatan yang dapat mengarah pada gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

## **3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan**

Adapun jumlah personel dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi ketenteraman dan ketertiban umum sebanyak 61 pegawai, yang terdiri dari personel di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas sebanyak 33 pegawai dengan pangkat dan golongan yaitu gol. II 12 orang, gol. III 15 orang dan gol. IV 6 orang, dan dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 28 pegawai dengan pangkat dan golongan yaitu gol. II 22 orang, dan gol. III 6 orang.

## **4. Sumber Dan Jumlah Anggaran**

Adapun sumber dan jumlah anggaran dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi ketenteraman dan ketertiban umum berasal dari

APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2011 dengan total nilai anggaran Rp. 8.590.330.899,-

## **5. Penanggulangan Dan Kendalanya**

Penanggulangan terhadap permasalahan ketentraman dan ketertiban umum bersifat kasuistik, yakni kasus pertikaian antara warga yang terjadi penanganan dan penanggulangan yang dilakukan Pemerintah Kota Ternate melalui Badan Kesbangpol dan Linmas adalah berkoordinasi bersama Aparat keamanan (Polres Kota Ternate) yang secara langsung melerai kelompok yang bertikai sekaligus menempti dan menjaga titik-titik rawan terutama areal batas antara kelurahan.

Upaya selanjutnya adalah memfasilitasi pertemuan antara Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda guna membuat kesepakatan dan perjanjian damai dan ketentuan pemberian sanksi tegas jika masih ada di antara pihak-pihak yang mencoba mengulangi atau membuat masalah.

Selain itu juga dilakukan pendekatan dan sosialisai dalam rangkai meningkatkan rasa kesadaran, kebersamaan dan persaudaraan antara sesama warga melalui momentum pelaksanaan Shalat Magrib berjamaah antara aparat pemerintah, Aparat Kepolisian dan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda serta Warga Kelurahan Mangga Dua, bertempat di Masjid At-Taubah Kelurahan Mangga Dua, yang dilanjutkan Shalat Isya berjamaah dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda serta warga masyarakat Kelurahan Ubo-Ubo dan Tobona bertempat di Masjid Kelurahan Ubo-Ubo.

Dalam penyelesaian masalah lapangan di bidang ketentraman dan ketertiban umum masih sering ditemukan kendala karena



kurang kesadaran warga sehingga sangat rentan terhadap isu dan mudah terprovokasi.

## **6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan**

Guna menindaklanjuti beberapa regulasi dari Pemerintah Pusat sekaligus berbagi upaya koordinatif dalam rangka memantau, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi tentang perkembangan situasi dan isu strategis, potensi ancaman dan gangguan keamanan (Kondisi IPOLEKSOSBUD-HANKAM) di Kota Ternate maka Badan Kesbangpol dan Limnas telah memfasilitasi pembentukan lembaga ekstra (Dengan Keputusan Walikota Ternate) yang keanggotaannya terdiri dari unsur terkait, baik Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Perguruan Tinggi maupun stakeholder lainnya termasuk TNI dan POLRI, melalui Keputusan Walikota Ternate, yakni :

- Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kota Ternate;
- Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Ternate;
- Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Ternate;
- Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing di Kota Ternate;
- Satuan Tugas (SATGAS)Kewilayahan Kota Ternate;

Dalam penanggulangan masalah keamanan, ketentraman dan ketentraman umum di Kota Ternate senantiasa di koordinasikan dengan melibatkan pihak aparat keamanan (POLRI dan TNI), termasuk instansi vertikal dan unsur terkait lainnya yang di libatkan diantaranya: Kejaksaan Negeri Ternate, Pengadilan Negeri Ternate, Kantor Imigrasi Kota Ternate, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Kota Ternate, Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), Satuan Gabungan Intelijen (SGI).

Selain itu guna menciptakan sekaligus menjaga situasi keamanan dan kenyamanan di lingkungan kelurahan maka upaya koordinasi juga di lakukan melalui jaring informasi bersama Kepolisian Sektor (POLSEK) dengan melibatkan komponen Satuan Linmas Organik Kota Ternate yang berdomisili dan tersebar di kelurahan dalam Wilayah Kota Ternate.

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Berdasarkan gambaran kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2011, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dilaksanakan implementasi pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, pada umumnya dinilai berjalan dengan lancar.

Hasil pembangunan di Kota Ternate pada hakekatnya merupakan hasil sinergi dari kinerja eksekutif, legislatif, masyarakat dan dunia usaha. Keberhasilan proses pembangunan yang ketercapaiannya diukur melalui penilaian terhadap berbagai indikator pada visi dan misi Kota Ternate 2011-2015 yang dalam konteks tahunan telah direfleksikan pada target-target dalam pentahapan RPJMD yang selanjutnya telah diimplementasikan dalam RKPD dan KUA-PPAS. Maka terkait dengan pencapaian target ditahun 2011 dari uraian sebelumnya secara umum memenuhi target tersebut, hal ini ditunjukkan dengan berbagai keberhasilan pencapaian pada 11 Program Prioritas Visi Bahari Berkesan.

Meskipun demikian, disamping keberhasilan masih terdapat pula beberapa kekurangan yang merupakan tantangan yang secara bertahap akan diselesaikan. Penyampaian gambaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di atas, bukanlah akhir dari kepuasan kinerja pemerintah Kota Ternate dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, karena masih banyak agenda yang harus dilaksanakan dalam tahun-tahun selanjutnya.

Beberapa keberhasilan pembangunan dalam berbagai kehidupan masyarakat, tidak terlepas dari itikad baik, kerja keras, kreativitas, dan inovasi dari semua pihak yang memiliki keterkaitan fungsi sesuai dengan bidang tugas dan usahanya masing-masing. Dengan demikian capaian kinerja selama Tahun 2011 merupakan keberhasilan bersama antara

Pemerintah Daerah, Legislatif serta seluruh masyarakat Kota Ternate, sehingga di masa mendatang, kerjasama semua komponen di Kota Ternate untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, adalah aspek yang sangat dibutuhkan dan harus dikembangkan secara berkelanjutan.

Demikian pokok-pokok substansi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, untuk selanjutnya akan menjadi referensi kajian Dewan yang terhormat.

Mengakhiri laporan ini, khususnya terkait dengan dinamika perkembangan masyarakat saat ini, dengan wacana kenaikan BBM Saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat dan kita semua untuk dapat merespon kondisi ini dengan arif dan proporsional, mari kita hindari sikap arogansi dan anarkis yang justru merugikan masyarakat, kita sikapi kondisi ini dengan mencari solusi konstruktif dalam mensejahterakan masyarakat di daerah ini. Selanjutnya Saya bersama Saudara Saya Ir. Arifin Djafar, MBA selaku Walikota dan Wakil Walikota Ternate, perlu menyampaikan apresiasi secara khusus kepada segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, karena terjalinnya kemitraan yang baik, dengan harapan kemitraan ini tetap dapat dipertahankan, karena perjalanan kami dalam mengemban misi dan amanat rakyat terasa masih panjang, serta berbagai tantangan dan permasalahan kedepan semakin kompleks, yang membutuhkan komitmen dan tanggung jawab kita bersama.

Terima kasih dan penghargaan pula kami sampaikan kepada para Muspida, Perguruan Tinggi, dan Pimpinan instansi vertikal maupun rekan, yang telah menjalin koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kota Ternate selama ini, demikian pula atas peran pers dan media massa maupun unsur *stakeholder* lainnya dalam mengkomunikasikan berbagai kebijakan Pemerintah Kota Ternate.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhai dan memberikan kekuatan kepada kita bersama dalam melaksanakan amanat rakyat dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan di daerah ini.

Ternate, 30 Maret 2012

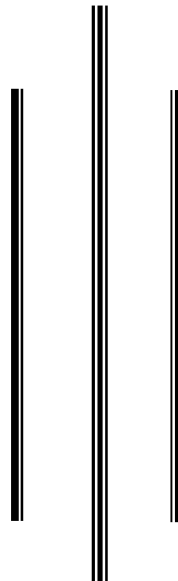
**WALIKOTA TERNATE**

**H. BURHAN ABDURAHMAN**



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
WALIKOTA TERNATE TAHUN ANGGARAN 2011  
DIHADAPAN SIDANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TERNATE**

*TANGGAL, 30 MARET 2012*



**PEMERINTAH KOTA TERNATE**

**TAHUN 2012**